

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu orang tua, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 6 yang berbunyi “Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.

Pendidikan semakin hari semakin diuji dengan berbagai masalah, mulai dari degradasi moral, pengetahuan, kebebasan pengaktualisasian diri, keterampilan, hingga *output* nya yang berupa kemampuan progresif untuk memecahkan permasalahan yang konstektual sulit untuk digapai, atau disebut juga dengan *dehumanisasi*. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hegemoni dari berbagai pihak, yang membuat pendidikan jauh dari cita-cita idealnya, terlebih upaya pemerintah yang tidak pernah konsisten dengan kebijakannya sehingga lagi-lagi pendidikan menjadi sebuah instrumen yang tidak pernah selesai dan dituding biang kegagalan.

Pendidikan seharusnya dapat memberikan solusi yang membangun dalam menghadapi tantangan zaman untuk memenangkan persaingan di masa depan, sehingga menciptakan sesuatu yang *humanis* bukan *dehumanis*. Sebagaimana menurut (Muhibbin, 2014) Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, perlunya keterlibatan masyarakat yang selanjutnya difokuskan pada orang tua dalam memecahkan permasalahan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dikehidupan nyata (kontekstual).

Membangun keterlibatan atau partisipasi orang tua agar berperan serta terhadap pendidikan bukan hal yang mudah, karena tidak semua orang tua sadar dan paham mengenai perannya terhadap pendidikan, terlebih jika kita dihadapkan dengan masyarakat dipedesaan yang memiliki pandangan, karakter, dan budaya

yang berbeda dengan masyarakat diperkotaan dalam hal pendidikan sehingga tingkat kesadarannya pun berbeda. Namun penelitian ini bukan untuk membandingkan kesadaran antara orang tua / masyarakat di desa dan di kota, melainkan mengambil perilaku positif masyarakat desa untuk kemudian di ambil perilaku positif tersebut dalam upaya membangun kesadaran orang tua/masyarakat terhadap pendidikan yang ada dilingkungannya.

Menurut Roucek dan Warren (1962) dalam (Rahardjo, 2014) masyarakat desa memiliki kecenderungan perilaku yang homogen, memiliki peranan kelompok primer yang besar, hubungan kekeluargaan yang awet, mobilita sosial rendah, dan populasi anak dalam proporsi yang lebih besar. Dari pernyataan tersebut, penulis mengambil salah satu karakteristik masyarakat desa dari teori diatas yakni peranan kelompok primer, peranan kelompok primer disini berarti kelompok sosial yang hubungan antar anggotanya sangat erat, bersifat personal, emosional, mesra, dan akrab. Hal ini mencerminkan pada tatanan kehidupan yang sesuai dengan lingkungan di MI Bongas 1 karena notabene masyarakatnya masih asli dari daerah, atau jarang penduduk pendatang, sehingga masyarakatnya masih homogen atau sama dalam hal budaya, mata pencaharian, dan berada dalam ruang lingkup yang sama, sehingga program paguyuban disini sangat berasaskan kekeluargaan. Untuk itu, program paguyuban dijadikan suatu alternatif dalam membangun kesadaran untuk saling bekerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan.

Program paguyuban sangat menjunjung nilai falsafah bangsa yakni pancasila terutama sila ke-3 yang berbunyi "*persatuan indonesia*", sehingga harus ada suatu ruang yang mewadahi dalam mempertahankan nilai falsafah tersebut, karena seiring berkembang nya zaman nilai leluhur atau budaya kekeluargaan yang berasaskan gotong royong ini akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu pihak kepala sekolah beserta jajaran membuat suatu kebijakan pendidikan berupa kelompok sosial yang berasaskan kekeluargaan.

Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong (Soekanto, 2006). Di dalam kelompok sosial

tersebut orang tua peserta didik diberikan pembinaan mengenai peran serta tanggung jawabnya terhadap pendidikan sehingga mereka yang awalnya sangat acuh menjadi sadar dan memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal yang menyangkut pendidikan.

Menurut Sudjana (2006) Pembinaan adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controlling*) penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan pemantauan proses pelaksana kegiatan. Dari pembinaan tersebut, diharapkan dapat membangun kesadaran orang tua peserta didik sehingga orang tua peserta didik dapat berperan aktif terhadap tanggung jawab pendidikan.

Dalam UU No 20 Tahun 2003 BAB XV Pasal 54 tentang Sisdiknas tertulis bentuk-bentuk peranan masyarakat/orang tua peserta didik, diantaranya : “(1)Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan”. Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai pengimplementasian peranan orang tua siswa terhadap pendidikan melalui kategori organisasi masyarakat atau kelompok sosial yang disebut dengan program paguyuban.

Menurut KBBI paguyuban merupakan perkumpulan yang bersifat kekeluargaan yang ditujukan kepada orang tua atau anggota keluarga lain dalam rangka menyalurkan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan perannya. Peranan disini jelas ditujukan pada pendidikan. Sehingga, apabila program paguyuban ini dapat dikelola dengan baik maka kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab pendidikan akan terbangun dengan baik pula. Selain itu, program paguyuban juga dapat dijadikan sebagai upaya sinergitas antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat (orang tua peserta didik)

sehingga secara *holistic* menjadi upaya menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan pendidikan.

Tujuan program paguyuban adalah untuk membangun sinergitas atau kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua peserta didik. Karena segala hal yang menyangkut kepentingan pendidikan bisa dikomunikasikan secara bersama-sama. Dalam hal ini, kepala sekolah di MI Bongas 1 membuat sebuah program kelompok sosial yang dinamai dengan program paguyuban.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di MI Bongas 1 Cililin Kab. Bandung Barat berupa observasi dan wawancara dengan kepala sekolah MI Bongas 1 yaitu Ibu Alis Sulastri bahwa program paguyuban dimulai sejak tahun 2016 dibawah kepemimpinannya, tujuan diadakannya program paguyuban sebagai upaya sinergitas antara lembaga pendidikan dan orang tua peserta didik. Sebelum adanya program paguyuban, sama sekali belum adanya kesadaran dan pemahaman mengenai tanggung jawab pendidikan, seperti misalnya : orang tua peserta didik mengira bahwa pendidikan adalah tanggung jawab penuh pemerintah dan lembaga pendidikan, sampai-sampai peralatan yang dibutuhkan anaknya seperti buku, seragam olahraga, dll merupakan tanggung jawab sekolah yang sudah diberikan anggaran oleh pemerintah, termasuk di era pandemi ini banyak orang tua yang mengeluh dan sebagian orang tua tidak ikut serta dalam mendukung aturan kebiasaan baru di era covid-19 ini. Pihak sekolah pun tidak menyalahkan orang tua, karena notabene pendidikan terakhir orang tua peserta didik di MI Bongas 1 hanya sampai SD-SMP, meskipun ada beberapa orang tua yang sarjana.

Dalam mengubah tatanan paradigma yang sudah sekian lama melekat ini maka perlunya diadakan suatu program yang dapat mendukung terealisasinya program di MI Bongas 1. Setelah kurang lebih 3 tahun program paguyuban berjalan, program paguyuban dijadikan forum untuk membangun kesadaran orang tua peserta didik terhadap tanggung jawab pendidikan, yang apabila kesadarannya sudah terbangun, yang terjadi ialah kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua peserta didik, sehingga dari kesadaran yang terbangun, dapat memberikan peran serta orang tua peserta didik terhadap lembaga pendidikan.

Dari paparan di atas, program paguyuban merupakan sebuah upaya untuk membangun kesadaran orang tua peserta didik terhadap tanggung jawab pendidikan. program paguyuban ini belum dikatakan berhasil tapi juga tidak gagal.

Bentuk program paguyuban yang diselenggarakan di MI Bongas 1 berupa kerjasama lembaga pendidikan dengan orang tua siswa, lalu dibentuk struktur paguyuban mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dll agar program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat di pertanggungjawabkan. Dengan demikian, program paguyuban merupakan sebuah wadah yang dapat membangun kesadaran orang tua peserta didik terhadap tanggung jawab pendidikan dalam hal kerjasama antar keduanya demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis berinisiatif untuk mengadakan penelitian dengan judul “Model Implementasi Membangun Kesadaran Orang Tua Peserta Didik terhadap Tanggung Jawab Pendidikan melalui Program Paguyuban”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud program paguyuban di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana tujuan program paguyuban di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat?
3. Apakah program paguyuban dapat diterima dengan baik dikalangan orang tua peserta didik di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat?
4. Apa saja faktor-faktor penunjang dan penghambat proses pelaksanaan program paguyuban di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat?
5. Bagaimana keberhasilan program paguyuban di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui maksud program paguyuban di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui tujuan program paguyuban di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui program paguyuban dapat diterima dikalangan orang tua peserta didik MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat proses implementasi program paguyuban di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui keberhasilan program paguyuban di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang nilai-nilai pancasila yang diwadahi melalui program paguyuban, sehingga akan membangun kesadaran orang tua siswa dan berperan aktif terhadap tanggung jawab pendidikan khususnya di lingkungan MI Bongas 1.

B. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Pertama, agar peneliti dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan dan pengalamannya selama perkuliahan berlangsung tentang perkuliahan dan keorganisasian. *Kedua*, agar peneliti mengetahui secara fakta dilapangan tentang tanggapan masyarakat mengenai program paguyuban. *Ketiga*, untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dan ikut terlibat dalam pengimplementasian program paguyuban di MI Bongas 1. Dan yang *keempat*, menjalin silaturahmi dan melatih komunikasi dengan warga sekolah dan orang tua peserta didik.

b) Bagisiswa

Mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya mengenai pembelajaran

dan segala bentuk kegiatan yang ada di sekolah

c) Bagi guru

Membangun sinergitas dengan orang tua peserta didik dalam pembelajaran yang ingin dicapai dan meringankan segala permasalahan yang terjadi pada peserta didik.

d) Bagi sekolah

Meningkatkan kualitas sekolah dengan pencapaian berbagai program, sehingga mendapatkan akreditasi yang baik dan mendapatkan citra dan apresiasi yang baik dari berbagai pihak.

e) Bagi kepala sekolah

Meningkatkan kualitas keprofesionalisme kepala sekolah selama memimpin atau menjabat di MI Bongas 1.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar penelitian tidak meluas dan bersifat kompleks pembahasannya, maka diadakan pembatasan-pembatasan masalah sebagai berikut :

- 1) Program paguyuban dijadikan sebagai wadah dalam proses pengimplementasian membangun kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab pendidikan di MI Bongas 1 Cililin Kab. Bandung Barat.
- 2) Penelitian ini hanya dilakukan di MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat.
- 3) Peneliti hanya meneliti dan mendeskripsikan program yang sudah dicapai dan memberi masukan yang membangun sesuai dengan situasi dan kondisi untuk kemajuan MI Bongas 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat kedepannya.

F. Kerangka Berpikir

Ketika menginginkan suatu pengimplementasian maka seseorang dipastikan sudah memiliki gambaran atau bayangan dari wujud apa yang akan diimplementasikan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Bayangan atau gambaran konsep ini penulis sebut dengan model. Menurut bullock (Wahab, 2012) model adalah *“a representation of something else, designed for a specific purpose”* (model merupakan representasi dari sesuatu yang lain yang dirancang untuk tujuan tertentu).

Model merupakan gambaran atau bayangan untuk mengejawantahkan, mencoba, meniru, meramalkan sesuatu hal yang rumit menjadi sederhana. Contohnya : seorang guru akan menjelaskan sebuah materi sejarah, namun ia ingin para peserta didik bisa memahami isi pembelajaran sehingga sang guru mencari cara agar pembelajaran tersebut tidak menjenuhkan, maka guru tersebut menerapkan model card sort, mereka di perintahkan untuk mengurutkan kartu sesuai dengan kejadian dari masing-masing sub materi sejarah. Tidak hanya di dalam pembelajaran saja, dalam sebuah kebijakan program pun memerlukan sebuah model yang cocok untuk diterapkan, karena tidak semua model dapat diterapkan pada semua persoalan.

Untuk menilai bagus atau tidaknya sebuah model bukanlah sesuatu yang mudah, karena harus pandai menentukan model mana yang sekiranya cocok dengan kebutuhan yang akhirnya dapat melahirkan atau mengimplementasikan suatu kebijakan yang tepat.

Menurut Anderson (Wahab, 2012) kebijakan merupakan *“purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern”* (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi).

Membahas mengenai kebijakan, peneliti mengambil sedikit teori mengenai kebijakan sosial, dikarenakan penelitian ini berhubungan dengan masalah bersama atau kebijakan didalam kelompok sosial. Menurut (Suharto, 2012) kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial. Tujuan kebijakan sosial dalam konteks pembangunan sosial, merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni : memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Jadi kesimpulannya, kebijakan disini merupakan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan sosial yakni masalah sosial dan kebutuhan sosial.

Membahas mengenai tindakan untuk menerapkan suatu model dengan tujuan atau cita-cita tertentu haruslah memiliki usaha untuk mencapainya. Usaha pencapaian tersebut penulis namakan dengan kata implementasi. Menurut KBBI Implementasi dapat diartikan sebagai bentuk aksi nyata terhadap suatu rencana yang telah di susun sebelumnya.

Menurut Van Hom (Wahab, 2012) proses implementasi dirumuskan sebagai *“those action by public of private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam memutuskan kebijakan pengimplementasian suatu program disini, lembaga pendidikan khususnya kepala memutuskan secara sekolah tidak serta merta memumtuskan secara sepihak, namun mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan tua peserta didik, dan para orang tua peserta didik pun sangat sepakat dengan adanya sebuah kebijakanm paguyuban ini.

Paguyuban merupakan suatu program kelompok sosial yang berasaskan kekeluargaan. Paguyuban lahir berlandaskan nilai pancasila dan bukti kedemokrasian sebuah lembaga pendidikan, dimana segala sesuatunya harus bersumber pada 5 nilai dasar yang disebut pancasila , kelima dasar tersebut diantaranya memuat persatuan, persaudaraan, gotong royong, hingga memuat hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.

Menurut Rindjin (2012) ia mengatakan “Nilai-nilai Pancasila sangat menyentuh kehidupan nyata manusia, ia berkenaan pada nilai hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, kerakyatan dengan musyawarah mufakat, serta keadilan sosial. Nilai-nilai ini bukan hanya kehidupan manusia, ia juga memiliki manfaat. Setiap menghadapi masalah dalam hidup ini, kita wajib melihatnya dari sudut pandang kaca mata Pancasila dan memecahkan masalah itu berdasarkan nilai-nilai pancasila”. Begitupun dengan program paguyuban, ia lahir dari landasan Pancasila, dan dibentuk oleh kesepakatan

bersama. Untuk itu, tidak ada yang bertentangan dalam melahirkannya kebijakan sosial berupa program paguyuban. Sehingga implementasi program paguyuban merupakan hal yang positif untuk direalisasikan, sebagai penunjang keberlangsungannya pendidikan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan, agar pendidikan dapat menghapuskan penjajahan bukan justru secara tidak sadar melahirkan penjajahan. Hal itu seiring dengan bunyi UUD 1945 *alinea pertama* berbunyi: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan”.

Adapun yang menjadi tujuan adanya kebijakan sosial berupa program paguyuban yakni untuk membangun kesadaran orang tua terhadap perannya didalam pendidikan.

Menurut Iffe (2002:242-243) upaya membangkitkan kesadaran masyarakat (*consciousness raising*) berawal dari upaya menghubungkan antara individu dan struktur yang lebih makro (seperti struktur sosial, dan politik). Hal ini bertujuan membantu individu melihat permasalahan, impian, aspirasi, penderitaan ataupun kekecewaan mereka dari perspektif sosial politik yang lebih luas (Adi, 2008).

Dari kutipan diatas, dapat diambil benang merah yakni struktur sosial atau penghubungan antara beberapa individu menjadi struktur yang lebih makro dapat membangkitkan kesadaran masyarakat atau orangtua. Program paguyuban ini menjadi ruang untuk orang tua peserta didik bermusyawarah mufakat dalam membicarakan berbagai persoalan.

Dalam hal itu, seperti dalam kutipan individu (orang tua) akan melihat permasalahan lalu berempati untuk bersama-sama mencari solusi dalam memecahkan permasalahan, atau individu memiliki impian lalu bekerjasama untuk merealisasikan, atau bahkan individu memiliki kekecewaan lalu bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan. Diantara persoalan yang muncul dan pernah di musyawarahkan diantaranya: persoalan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, bekerjasama untuk mendukungnya sebuah program (misal : jum'at sedekah, sholat dhuha, kurban,dll) bekerjasama untuk saling mendidik dan mengajar, bekerjasama jika peserta didik akan mengikuti lomba antar sekolah,

membicarakan persoalan keuangan dan administrasi (misal: bantuan KIP, perpindahan kelas VI, study tour, dsb).

Paguyuban merupakan suatu wadah yang berhubungan dengan masalah sosial, sehingga paguyuban lahir tidak serta merta hanya sebuah gagasan perorangan atau individu saja, ia merupakan kebijakan bersama yang selanjutnya peneliti sebut dengan sebutan kebijakan sosial. Ia lahir dengan berbagai pertimbangan bersama, gagasan bersama, dan tanggung jawab bersama.

Ketika telah mengimplementasikan suatu kebijakan sosial, hal itu dapat menciptakan reformasi pendidikan. Reformasi adalah sebuah perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan yang rusak, meninggalkan budaya yang seharusnya ditinggalkan hingga merubah tatanan yang kurang baik menjadi baik. Reformasi berbeda dengan revolusi, sehingga reformasi yang dimaksudkan peneliti yaitu yang sering kita dengar dengan inovasi pendidikan. (Hasbullah, 2015) inovasi pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia kependidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan lebih pesat. Menurut David D. Curris (2000) dalam upaya mereformasi dalam bidang pendidikan, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, ada empat strategi mayor dalam reformasi pendidikan, yaitu :

- 1) Akuntabilitas berbasis standar (*standards based accountability*)
- 2) Reformasi Sekolah secara menyeluruh (*whole school reform*)
- 3) Strategi pasar (*market strategies*)
- 4) Pembuatan keputusan yang bersifat demokratis atau pelimpahan kewenangan dalam pembuatan (*shared decision making*) (Tilaar, 2012).

Fokus utama peneliti yaitu pada poin ke-empat, tujuan berbagai pihak yang terlibat di MI Bongas 1 mengimplementasikan program paguyuban yaitu dalam rangka pembuatan keputusan yang bersifat demokratis atau pelimpahan kewenangan secara bersama.

Menurut Ismawati (2012) masyarakat yang demokratis atau yang berkedaulatan rakyat, yaitu masyarakat yang dibentuk karena kesepakatan bersama dari para anggotanya, mereka memiliki cita-cita untuk mewujudkan cita-cita bersama dan berkewajiban untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan

bersama tersebut. Menurutnya, ciri masyarakat desa antara lain :

Warga masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang erat dan mendalam

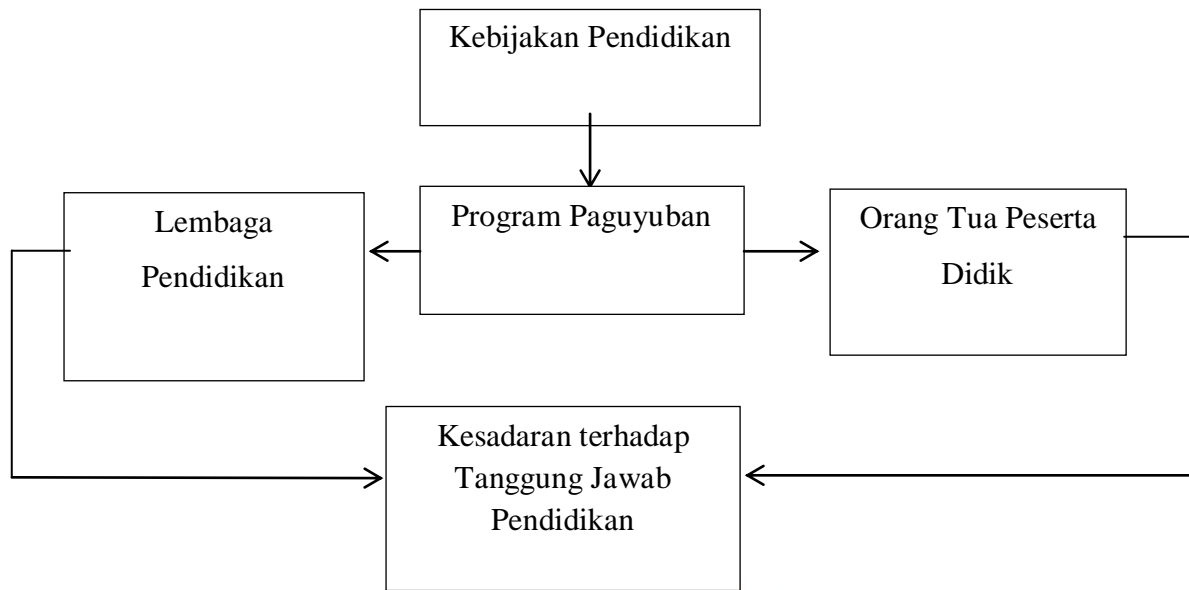
- 1) Sistem kehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan
- 2) Hidup dari pertanian, pekerjaan lain hanya dianggap sebagai sampingan
- 3) Tidak setiap orang memiliki tanah
- 4) Cara bertani masih tradisional, tidak efisien, karna belum mengenal mekanisasi.

Menurut Ridwanullah (2016) masyarakat pedesaan adalah sekelompok yang berhubungan secara erat, tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir sama (homogen) disuatu daerah (wilayah) tertentu dengan mata pencaharian dari sektor pertanian (agraris).

Adapun menurut abu ahmadi dalam (Ridwanullah, 2016) masyarakat pedesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Memiliki hubungan yang mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya diluar batas-batas wilayahnya.
- 2) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (paguyuban).
- 3) Sebagian masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian biasanya merupakan pekerjaan sampingan (*part time*) biasanya sebagai pengisi waktu luang.
- 4) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

Dari ciri masyarakat diatas, masyarakat dilingkungan MI Bongas 1 dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan, karena berada di lingkungan pedesaan, memiliki mata pencaharian yang homogen yaitu sebagai petani dan nelayan karena memiliki potensi saguling yang banyak dijadikan sebagai mata pencaharian, agama nya homogen yaitu muslim, adat istiadatnya pun terus turun temurun. Sehingga sangat cocok dan akan dapat menerima kebijakan program paguyuban. Secarailustratifhubungan tersebut digambarkan kedalam kerangka pemikiran sebagaiberikut :



Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebagai acuan penelitian, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan (Rodhiyatun, 2018) yang berjudul “Program Paguyuban Orang Tua Wali Murid Dalam Meningkatkan Pembinaan Keagamaan Peserta Didik di MI Ma’arif Bego Sleman”. Dalam skripsi ini Hasnik Rosyidatun menyebutkan bahwa seiring berkembangnya zaman dan semakin pesatnya arus globalisasi, maka MI sebagai lembaga pendidikan islam yang memiliki peranan penting dalam hal keagamaan seyogianya memfasilitasi ruang untuk meningkatkan pembinaan keagamaan, program yang disebut POWM ini dijadikan wadah yang dapat membina keagamaan peserta didik yang berlokasi di MI Ma’arif Bego Sleman. Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu di MI (Madrasah Ibtidaiyah). Perbedaan penelitian terletak pada subjek dan tujuan yang diteliti yaitu jika penelitian diatas fokus pada siswa sebagai subjek dan tujuannya untuk meningkatkan pembinaan keagamaan, sedangkan subjek penulis adalah orang tua dan tujuannya untuk membangun kesadaran.
2. Penelitian yang dilakukan (Alim Ikhsan, 2019) yang berjudul “Pengelolaan Paguyuban Kelas” ia menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi terbentuknya

paguyuban kelas yaitu adanya kompleksitas kebutuhan antara sekolah dengan orang tua siswa yang ingin melihat perkembangan siswa selama di sekolah. Paguyuban kelas dibentuk dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara orang tua dan guru. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada jenjang pendidikan yaitu SD-MI, dan bertujuan untuk membangun sinergitas atau ia menyebutnya dengan komunikasi antara orang tua dan lembaga pendidikan. sedangkan perbedaannya terdapat pada ruang lingkup dimana penulis meneliti paguyuban dalam ruang lingkup sekolah untuk membangun kesadaran, sedangkan penelitian diatas fokus pada pengelolaan paguyuban kelas saja.

3. (Lintang Sharastuti H. Y., 2018) dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Paguyuban Masyarakat Bersatu (PAMBERS) Dalam Mewujudkan Harmonisasi Masyarakat”. Dalam skripsi ini Lintang Sharastuti menyebutkan bahwa semakin baik pelaksanaan program kegiatan pambers dilaksanakan, maka akan semakin baik pula peningkatan keamanan demi mewujudkan harmonisasi warga masyarakat di Kampung Sritejokencono. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yaitu masyarakat pedesaan, sedangkan perbedaannya jika fokus peneliti terdahulu membahas masalah kesejahteraan sosial, sedangkan skripsi yang diangkat oleh peneliti membahas membangun kesadaran orang tua peserta didik.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa orang yang meneliti mengenai pelaksanaan program paguyuban sebagai wadah untuk memecahkan berbagai permasalahan juga sebagai pemenuhan berbagai kebutuhan.

